

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:  
**AHMAD SOLIHIN**  
NIM. E42012097

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : [solihin2122@gmail.com](mailto:solihin2122@gmail.com)

## **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Desa Sungai Ambawang Kuala. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pola pemberdayaan yang diterapkan mengikuti tahapan dalam pedoman umum penyelenggaraan program PSP3 yang terdiri kegiatan awal, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun, belum optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 karena faktor tingkat partisipasi, kemampuan, dan lahan. Untuk itu merekomendasikan pemilihan rintisan usaha disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, dan mengoptimalkan fungsi koordinasi.

Kata-kata Kunci : Pemberdayaan, Program, dan Pemuda Sarjana

## **THE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH PROGRAMME YOUTH BACHELOR DEVELOPMENT ACTIVATOR PROGRAMME ON THE VILLAGES AT SUNGAI AMBAWANG KUALA, SUNGAI AMBAWANG SUB DISTRICT, KUBU RAYA COUNTY**

### **ABSTRACT**

This thesis aimed to describe a process of community empowerment through youth bachelor development activator programme on the villages at Sungai Ambawang Kuala village. This thesis is based on height of jobless and lack of community wishes to do a business. This research used descriptive study by qualitative approach. The result of this research are applying empowerment model according to the steps in general guidance of youth bachelor depelovment activator programe implementation that consist of firs activity, planning, implementation, evaluation. But, community empowerment in farming done by participants factor, degree, competence, and lands. The recommendations of this research are the business planning have to be match with the competence and optimize coordination function.

*Keywords : Empowerment, Programme, and Youth Bachelor.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 5 persen sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi yang positif itu menumbuhkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia pada tahun 2010, jumlah kelas menengah mencapai 134 juta orang atau sekitar 56.5 % dari total penduduk Indonesia. Namun yang menjadi masalah di kelas menengah adalah keberadaan kaum muda terdidik belum cukup produktif dan kontributif terhadap masyarakat, khususnya lapisan bawah. Pada umumnya kaum muda di kalangan kelas menengah cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian serius untuk menangani masalah pengangguran usia muda agar dapat terserap oleh industri (Sakernas Agustus 2014, BPS(diolah)).

Berdasarkan Buku Pedoman PSP3 (2015:13-14) Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan pemuda, dengan memfasilitasi potensi Pemuda terdidik di perdesaan.

Penyelenggaraan program PSP3 pada tahun 2015 didasari oleh Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 0184 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran program PSP3, dimana pemberdayaan pemuda di Provinsi Kalimantan Barat masih perlu ditingkatkan khususnya di daerah pedesaan. Program PSP3 tidak semata-mata dilaksanakan di setiap Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi penempatan PSP3 diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Program PSP3 pada tahun 2015 salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, mengingat usia kerja 15-64 tahun di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 tercatat sebanyak 350.284 orang atau 65,01% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 538.815 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 2.455 orang, jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya mencapai 399 orang saja (BPS KKR, 2015:87).

Para pencari kerja pada tahun 2014, tercatat sebanyak 1.224 orang memiliki ijazah Sarjana (Strata-I) dan 568 orang

memiliki ijazah Akademi (Diploma-III). Dalam hal ini yang dicatat sebagai pencari kerja hanya mereka yang melapor ke Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi, sedangkan para pencari kerja yang tidak melapor tentunya jauh lebih banyak (BPS KKR, 2015:88).

Berdasarkan laporan Tim Asistensi PSP3 bulan September (2015:5-11) tidak semua desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan peserta PSP3. Kabupaten Kubu Raya mendapatkan 9 peserta PSP3 yang tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kecamatan Rasau Jaya mendapatkan 4 peserta PSP3, sedangkan Kecamatan Sungai Ambawang mendapatkan 5 peserta PSP3 yang salah satunya di Desa Sungai Ambawang Kuala. Jumlah penempatan peserta PSP3 ini hanya mewakili 8,34 % dari 108 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, peran peserta PSP3 ini diharapkan dapat menjadi contoh dan memberikan motivasi kepada desa-desa yang tidak mendapatkan peserta PSP3.

Peserta PSP3 yang terpilih seharusnya melaksanakan tugas untuk menggerakkan dan mendampingi masyarakat guna menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan agar dapat mengurangi pengangguran SDM berpendidikan tinggi serta menciptakan

kemandirian pemuda dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sesuai dengan sasaran dari program PSP3 ialah tersedianya lapangan kerja terutama bagi pemuda di pedesaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan arus urbanisasi (Pedoman PSP3, 2015:24).

Berdasarkan Laporan Kegiatan PSP3 pada Bulan November 2015, terdapat masalah-masalah dilapangan yang menghambat peserta program PSP3 dalam menjalankan kegiatannya. Masalah yang terjadi di daerah penempatan peserta PSP3 ini antara lain ;

- a) Peserta merasa kurang nyaman dengan tempat tinggal yang di sediakan.
- b) Peserta mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi lahan pertanian yang akan dijadikan sebagai perintisan usaha pertanian,
- c) Pemuda terdidik maupun masyarakat yang akan di berdayakan masih dalam proses pencarian dan pendataan, dan
- d) Sistem monitoring yang sedang dikembangkan Kemenpora masih pada tahap pengembangan dan belum bisa diakses secara maksimal, sehingga masih terdapat masalah dalam laporan online.

## 1. Fokus Penelitian

Mengingat Kabupaten Kubu Raya memiliki 2 kecamatan yang mendapatkan

peserta PSP3 ini, tentunya penulis harus membatasi lokasi yang diteliti agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan dapat diselesaikan secepatnya. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Ambawang khususnya di Desa Sungai Ambawang Kuala.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah sebelumnya, peserta PSP3 mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugasnya dilapangan khususnya pada bidang pertanian yang dijadikan sebagai perintisan usahanya. Berkaitan dengan itu, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh peserta program Pemuda Sarjana.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang dan fokus masalah, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok daripada permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menggambarkan Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dalam Bidang Pertanian di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

## 4. Manfaat Penelitian

### 1) Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta perkembangan Ilmu Pemerintahan secara umum, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan.

### 2) Secara Praktis

Bagi penulis, sebagai sarana untuk melatih kemampuan berfikir secara ilmiah dan wahana belajar dari penerapan teori dalam dunia nyata, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Sebagai sumber referensi bagi para *stakeholder* dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan, pemberhentian

maupun perbaikan program yang di akan diteliti ini.

Bagi pihak akademisi, sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan terkait dengan pemberdayaan.

## B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

### 1. Kerangka Teori

Menurut Sumaryadi (2010:57) konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, keterselisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan / *powerless*. Dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan.

Ndraha (dalam Sumaryadi, 2010:57) menegaskan bahwa tujuan mutlak dari setiap program pemberdayaan adalah peningkatan *bargaining position* dan *bargaining power* suatu pihak agar mampu berhadapan secara relatif sejajar dengan pihak lain dalam rangka menciptakan rasa

keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling menguntungkan.

Kadarisman (2012:222) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan sesuatu peningkatan kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*), serta berbagai potensi yang sesungguhnya dimiliki pegawai. Clutterbuck, et al (dalam Kadarisman, 2012:223) mengemukakan dalam teorinya "*Empowerment in terms of encouraging and allowing individuals to take personal responsibility for improving the way they do their jobs and contribute to the organization's goal*". Atas pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu pemberian semangat dan mengizinkan individu untuk mengambil tanggungjawab dalam rangka memperbaiki cara yang mereka lakukan dalam pekerjaannya dan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Carlzon dan Macauley (dalam Adi, 2003:24) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Kebebasan disini bukan berarti hilangnya pengendalian terhadap

masyarakat itu sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Stewart (tt:24) pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hal-hal lain. Sesungguhnya pemberdayaan adalah masalah keuntungan: waktu, mutu, komitmen, gagasan, dan sebagainya. Yang paling penting pemberdayaan memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan staf sepenuh-penunya dan sebanyak-banyaknya.

Pemberdayaan masyarakat adalah individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta memiliki kebudayaan yang tinggi, untuk dapat bertahan dalam mengembangkan diri mencapai kemajuan (Hikmat, 2006:112). Menurut Hikmat (2006:3) konsep pemberdayaan masyarakat dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Surjono dan Nugroho (2008:25) mengatakan bahwa pemberdaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources*

*management*) sebagai mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasi dirinya (*empowerment*).

Berdasarkan beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diasumsikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran.

Berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan program PSP3 tahun 2015, PSP3 adalah singkatan dari Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan yaitu para pemuda yang berpredikat sarjana, memiliki karakter kemandirian dan jiwa kepeloporan yang berkemampuan melakukan pergerakan dan pendampingan. PSP3 merupakan program pemberdayaan masyarakat dimana tujuan program ini salah satunya yaitu "Mendayagunakan potensi ekonomi desa sebagai bagian dalam membangun keunggulan ekonomi desa", artinya dalam pelaksan program PSP3 masyarakat akan diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi desa baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan program PSP3 terdiri dari beberapa langkah kegiatan sebagai berikut; Sosialisasi dan Diseminasi, Lokasi Penempatan PSP3, Pemilihan Peserta, Orientasi Tahap I, Pembekalan, Orientasi Tahap II, Kegiatan Awal Penempatan di Desa, Perencanaan Program PSP3, Pelaksanaan Program, Penilaian Kinerja/Evaluasi (Pedoman PSP3, 2015:40).

Guna melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penelitian ini mengacu pada proses pemberdayaan berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3). Peneliti memulai penelitian sejak pelakana PSP3 melakukan kegiatan awal di Desa, melakukan perencanaan, melakukan kegiatan yang direncanakan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:21) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa

dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola- pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kegiatan Awal

Secara umum, proses pemberdayaan masyarakat oleh pelaksana program PSP3 dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan baik keagamaan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, administrasi dan kesehatan sesuai dengan arahan program itu sendiri. Sebelum melaksanakan semua kegiatan diatas,

pelaksana PSP3 tentunya terlebih dahulu telah melakukan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung kesiapan dan kemampuan pelaksana PSP3 dalam melaksanakan kegiatan di lokasi penempatan.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Kepemudaan dan Anggota Tim Asistensi PSP3 Provinsi, dana rintisan usaha yang menjadi modal bagi pelaksana PSP3 untuk memulai berwirausaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal diberikan kepada pelaksana PSP3 setelah proses pemetaan dan analisis potensi wilayah telah dilakukan. Dalam proses pemetaan serta analisis potensi wilayah tersebut, pelaksana PSP3 belum bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk memulai usaha dikarenakan keterlambatan dana yang belum mereka terima serta kondisi lingkungan masyarakat yang memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda terhadap program PSP3.

Sebagian masyarakat memiliki anggapan pelaksana PSP3 membawa dana yang banyak untuk melakukan kegiatan dan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga apapun yang masyarakat kerjakan akan mendapat bayaran dari pelaksana PSP3 ini, sehingga sulit mencari masyarakat yang dengan rela untuk merintis usaha dari nol.

Kebanyakan masyarakat hanya berpikir bahwa ada pekerjaan yang dapat dikerjakan kemudian dibayar, bukan bagaimana mereka membuat usaha yang mereka kelola sendiri. Pemikiran ini lah yang menyebabkan setiap pekerjaan yang melibatkan masyarakat cenderung sulit dan masyarakat menginginkan bayaran. Dana rintisan usaha yang digunakan semestinya bukan hanya untuk membiayai pekerja atau masyarakat yang bekerja saja, melainkan juga untuk membiayai proses usaha tersebut berlangsung. Kehadiran pelaksana PSP3 ditengah-tengah masyarakat ini belum dimanfaatkan dengan baik mengingat masyarakat hanya mengharapkan bayaran atas pekerjaannya.

Dari penelitian yang dilakukan, pada kegiatan awal pelaksana PSP3 dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa Pada Tahap Kegiatan Awal, Pelaksana PSP3 telah melakukan pemetaan potensi wilayah di Desa Sungai Ambawang Kuala. Kemudian mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melakukan sosialisasi – sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

Selanjutnya, tahap perencanaan dilakukan untuk mempermudah pelaksana dalam melakukan kegiatan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang

nantinya akan dihadapi pada pelaksanaan kegiatannya. Dalam perencanaan tersebut, pelaksana PSP3 melibatkan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dalam proses perencanaan dimana pemikiran dari masyarakat sangat membantu untuk memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kemudian pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan yaitu berupa kegiatan pertanian tanaman sayuran atau hortikultura. Dalam pelaksanaannya pelaksana PSP3 memberdayakan masyarakat sekitar untuk membantu mengolah lahan, melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman maupun hal-hal yang lainnya.

Tahap evaluasi merupakan tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung. Berhasil tidaknya kegiatan yang dilakukan kemudian dievaluasi untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Dalam tahapan evaluasi ini pelaksana PSP3 tidak melibatkan masyarakat untuk sama-sama melakukan evaluasi melainkan hanya dilakukan oleh pelaksana PSP3 dengan melihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

### **Faktor – faktor yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum optimal**

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya terkadang peserta mengalami hambatan dan kesulitan yang menjadi pembelajaran bagi pelaksana PSP3 itu sendiri. Begitu pula dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian yang bukan merupakan bidang keahliannya, dimana latar belakang pendidikan yang dimilikinya berupa keguruan bukan dalam bidang pertanian. Namun, pelaksana PSP3 telah mencoba memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Berdasarkan kegiatan awal pelaksana PSP3 memasuki lapangan tempat bertugas untuk selanjutnya melakukan adaptasi dengan lingkungan dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Pihak pihak terkait disini dapat berupa pihak pemerintah desa, pihak swasta maupun pihak masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, pelaksana PSP3 mencoba melakukan sosialisasi kepada pemuda yang merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PSP3. Namun, kurangnya minat, dukungan dan partisipasi dari pemuda ini

menyebabkan pemberdayaan yang dilakukan tidak melibatkan pemuda-pemuda yang berada di Desa Sungai Ambawang Kuala.

Banyak hal lain yang menjadi penghambat dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam proses pelaksanaan kegiatan usaha dibidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, terdapat oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang merusak tanaman serta mencuri peralatan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tersebut.

Kemudian, dalam perawatan tanaman yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 dan kelompok kerjanya masih belum maksimal dikarenakan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya masih terbatas dan kurangnya inisiatif dalam mencari solusi berupa alternatif-alternatif lain dalam merawat tanaman sehingga pada saat terjadi masalah dapat segera diatasi. Pelaksana PSP3 juga dihadapi dengan persoalan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian terjadi masalah administrasi dimana pemilik lahan ingin mengambil alih kembali lahan miliknya.

Berdasarkan ulasan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian belum optimal, faktor-faktor yang menyebabkannya tersebut diantaranya :

- a. Kurangnya minat pemuda dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan PSP3 di Desa Sungai Ambawang sehingga tidak adanya kader muda yang dapat diandalkan untuk melanjutkan usaha pertanian yang rintis.
- b. Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana PSP3 khususnya dalam bidang pertanian menyebabkan tidak terjadinya proses peningkatan terhadap masyarakat yang diberdayakan juga karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- c. Adanya masalah dalam administrasi lahan yang digunakan sebagai usaha pertanian, sehingga usaha dalam bidang pertanian yang dijalankan terpaksa tidak dapat dilanjutkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana PSP3 dalam bidang pertanian mengakibatkan program PSP3 belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Namun, berhasilnya pemberdayaan masyarakat tentu perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari

masyarakat, maka pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang melatar belakangi penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan kemudian dijelaskan kembali berdasarkan data-data di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Simpang Tiga Sudah sesuai prosedur yang berlaku hanya saja terjadi kendala yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Aparatur pemerintah desa masih belum mengerti dengan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- c. Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan
- Keluarga Berencana khususnya pada Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kecamatan masih kurang efektif dan tidak mencapai sasaran.
- d. Dalam pelaksanaan pembinaan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten khususnya pada bidang pemerintahan desa terjadi kendala-kendala dimana pada pelaksanaan pembinaan tersebut, kepala bidang pemerintahan desa mengundang instansi-instansi terkait untuk hadir dalam pembinaan tersebut sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Peran Pendamping Lokal Desa yang masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan ditingkat desa.
- f. Perekrutan Pendamping Desa yang masih tidak efektif dimana pemerintah provinsi menerima Pendamping Lokal Desa untuk di Kabupaten Kayong Utara, Pendamping Lokal Desa tersebut tidak berdomisili di Kabupaten Kayong Utara. Ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping Lokal Desa tersebut

tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa.

g. Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan baik dan dilaksanakan secara rutin. hanya saja pelaksanaan pembinaan tersebut harus ditambah lagi agar hasilnya lebih efektif.

h. Pemerintah Kabupaten melalui Bidang Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara secara rutin dan terstruktur dan harapan dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pelaksanaan pembinaan ini dapat ditambah dalam setiap tahunnya yang menurutnya 2 kali dalam setahun lebih efektif.

## E. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan

apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

a. Manajemen Keuangan Desa khususnya pada manajemen perencanaan masih membutuhkan pengarah yang lebih intensif dari pemerintah Kabupaten, sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana desa di Desa Simpang Tiga.

b. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maupun pemerintah Kecamatan Sukadana untuk pemerintah desa harus lebih ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih efektif.

c. Kepala Desa Simpang Tiga harus dapat mengadakan penerimaan calon staf aparatur desa yang baru untuk mengisi kekosongan aparatur yang ada, agar tidak kekurangan aparatur dalam melaksanakan pemerintahannya.

d. Selain mendapatkan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Desa Simpang Tiga juga harus aktif dan kreatif dalam meningkatkan kompetensi diri dengan cara mengadakan sendiri pelatihan di Desa dan mengundang

narasumber dari Pemerintah Kabupaten.

- e. Pendamping Lokal Desa harus ditingkatkan lagi perannya dalam membantu pemerintah desa Simpang Tiga untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik.

## F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, penulis mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah kendala dan keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian:

- a. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan Perencanaan Dana Desa khususnya pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015. Dikarenakan pemerintah desa masih belum bisa sepenuhnya bersifat terbuka terhadap informasi yang dimiliki, sehingga penulis harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkaitan dengan masalah yang diteliti..
- b. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan penulis mengakibatkan penulis kesulitan memperoleh jawaban yang lebih

dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Simpang Tiga.

- c. Akses jalan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten terlalu jauh, sehingga penulis harus menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan ketika melaksanakan penelitian dan juga penulis harus benar-benar mengetahui jadwal kesibukan para informan agar pada saat ketempat penelitian penulis langsung dapat menemui informan.
- d. Tidak tersedianya arsip desa meyangkut data-data yang diperlukan sehingga penulis merasa kesulitan dalam memperoleh data sebagai pendukung guna memecahkan masalah yang penulis teliti.

## G. REFERENSI

- Adisasmita, Raaharjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raaharjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifudin, 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fathoni, Abdurrahman, 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Prenada Media Group: Jakarta.

Kencana, Inu Syafii, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011.

Simamora, Henry, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung CV Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sulistiyani, T Ambar, & Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, 2010. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wiludjeng, Sri, 2007. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **Sumber Dokumen dan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surabaya: Rona Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Rekapitulasi Pencairan Dana Desa di Kecamatan Sukadana, Badan Pemeberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015.

Peraturan Desa Simpang Tiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Simpang Tiga Tahun 2015-2021.

Data Sekretariat Pendamping Lokal Desa tentang Rekapitulasi Pendamping Lokal Desa Kabupaten Kayong Utara.

#### **Penelitian, Naskah Akademik dan Makalah:**

Sunta, Mathilda. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang*. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sisianto, Depi. 2014. *Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu*. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAIH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ahmad Solihin  
NIM / Periode Lulus : E42012097 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [solihin2122@gmail.com](mailto:solihin2122@gmail.com) / 085750109622

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK  
PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN  
SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengahih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui  
Ketua Pengelola Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 16 Desember 2016

(Ahmad Solihin)